

**EFEKTIFITAS BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH
PIDANA**

(*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS*)

**STUDI KASUS PEMULANGAN KORUPTOR YANG
MELARIKAN DIRI KE LUAR NEGERI**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar

Oleh:

SULAEMAN

NIM.10500111116

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Efektifitas Bantuan Tibal Balik dalam masalah Pidana (mutual Legal Assistance in Criminal matters)* Studi Kasus Pemulangan Koruptor yang melarikan diri ke Luar Negeri ”, ini adalah benar-benar hasil karya sendiri. Dan jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



Makassar, 29 Juni 2015

Penyusun

SULAEMAN
NIM 10500111116

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “*Efektifitas Bantuan Tibal Balik dalam masalah Pidana (mutual Legal Assistance in Criminal matters)* Studi Kasus Pemulangan Koruptor yang melarikan diri ke Luar Negeri” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan keterbatasan dihadapi oleh penulis mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyelesaian tulisan namun berkat bantuan, bimbingan dan kerja sama berbagai pihak, hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi.

Kasih sayang mendalam untuk kedua orang tuaku tercinta, pembimbing hidupku, Ayahanda Suparman dan Ibunda Hj. Suriyani, atas segala cinta dan kasih sayang yang telah kau berikan sejak kecil sampai saat ini, doa semangat serta kerja kerasmu yang membuat penulis bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis baik berupa moral maupun berupa moril. Dengan rasa bangga dan harus saya ucapkan terima kasih kepada kakakku, Kartini Suparman S.Pd. tante Uperiani, dan adekku Sahriani atas segala dukungan, baik kepada penulis selama melakukan studi dan keluarga besar yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Oleh karena itu melalui tulisan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Terpilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. DR. H. Ali Parman, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak DR. Hamsir, S.H., M.Hum dan Ibu Istiqamah, S.H., M.H. masing-masing Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Pembimbing I Ayahanda Kasdjim Salenda, SH. M.Th.I. dan Pembimbing II Rahman Syamsuddin SH.MH. yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ketua Komisi Perlindungan Korupsi beserta jajarannya, serta semua pihak yang telah memberikan data/informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum Fakutas Syariah dan Hukum angkatan 2011 (terkhusus kepada Ilmu Hukum 7) yang mau berbagi suka duka, canda tawa, keluh kesah serta selalu memberikan motivasi agar cepat nyusul jadi sarjana.

8. Teman-teman (Yogi Proyugo S.H, Yuniana Ali S.H, dan Hamka terima kasih atas bantuan, dukungan dan pengertiannya.

Semoga bantuan, bimbingan, dukungan maupun pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dan bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu dengan penuh keterbukaan dan rasa rendah hati, segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif amat diharapkan semoga tulisan ini bermanfaat adanya. Amin.

Makassar, 28 September 2015

Sulaeman
10500111116



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	9
 BAB II: TINJAUAN TEORETIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	11
1. Pengertian Pidana Menurut Para Ahli.....	11
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	12
3. Unsur-unsur perbuatan melawan Hukum.....	15
4. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>).....	18
1. Pengertian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>).....	18

2. Sejarah Bantuan Hukum timbal Balik dalam Masalah Pidana.....	32
3. Prinsip Bantuan Timbal Balik dalam Hukum Pidana.....	33
4. Dasar Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>).....	34
5. Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dalam Perspektif Islam.....	37
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Sumber Data.....	43
E. Metode Penelitian.....	44
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Teknik Pengumpulan Data.....	46
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>).....	47
B. Kendala-kendala Bantuan Hukum timbal Balik dalam Masalah Pidana (<i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>).....	66
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Implementasi Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Nama : Sulaeman
Nim : 105001110116
Judul : Efektifitas Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
(Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

Studi Kasus Pemulangan Koruptor yang Melarikan Diri ke Luar Negeri

Skripsi dengan judul Efektivitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/ Studi Kasus Pemulangan Koruptor yang Melarikan Diri ke Luar Negeri dibuat dengan tujuan untuk : 1) Mendeskripsikan tentang bagaimanakah pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) oleh otoritas pusat terhadap pemulangan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri. 2) Mengetahui kendala dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang di hadapi oleh otoritas pusat.

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis penelitian hokum normatif, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini tergolong kualitatif, dengan menggunakan data berupa wawancara langsung/Tanya jawab (dialog) dokumen. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara sekunder, lalu kemudian teknik pengolahan dan analisa data yang dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (mutual Legal 'Assistance in Criminal Matters) muncul untuk menanggulangi kejahatan bersifat transnasional atau internasional sebagai akibat kurang efektifnya pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang selama ini dilakukan antar negara-negara yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut dengan tujuan agar menemukan jawaban yang empiris mengenai pelaksanaan Bantuan Timbal Balik serta kendala yang ditemukan oleh pihak otoritas pusat dalam pengembalian beberapa koruptor yang melarikan diri

ke luar negeri. Berdasarkan analisis data kualitatif diperoleh jawaban bahwa pemulangan koruptor melalui Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana memerlukan proses yang cukup panjang, biasanya otoritas pusat melakukan jalur non-formal atau melalui jalur imigrasi sehingga memudahkan pemulangan koruptor.

Hasil Penelitian ini menunjukkan banyaknya tantangan yang dihadapi oleh otoritas pusat, diantaranya, pengaruh geostrategis dan geopolitik Indonesia sebagai bargaining power negara dalam memandang dan menyikapi pelaku tindak pidana yang lari dan bersembunyi di luar negeri, perbedaan konsep teritorialitas dan nasionalitas setiap negara, serta perkembangan sistem hukum tiap negara yang berbeda.

Implikasi atau tujuan akhir dari hasil penelitian ini agar pihak otoritas pusat menggunakan upaya-upaya non-formal untuk mengembalikan para koruptor yang berada di luar negeri. Tidak hanya bergantung pada jalur-jalur formal yang biasanya digunakan oleh otoritas pusat yang menyebabkan lambannya proses pemulangan koruptor.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan sebuah entitas (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara¹, yang didalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terkait oleh kesatuan wilayah.² Negara sering dikatakan sebagai “kesatuan wilayah” karena wilayah bagi sebuah negara merupakan unsur bermukimnya penduduk, dan tempat bagi efektifitas fungsi sosiologis dan sekaligus tempat politis suatu negara.

Ketika suatu negara mampu melaksanakan kekuasaan dan wewenang wilayahnya, artinya wilayah tersebut telah memiliki sebuah “kedaulatan wilayah” (*territorial sovereignty*) yaitu otoritas khusus untuk melaksanakan kekuasaan dan wewenang di wilayahnya yang merupakan kewenangan tertinggi (*highest outhority*)³ yang merdeka (*independence*) dan bebas (*independent*)⁴ dari pengaruh kekuasaan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h.6

² Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Cet. III; Rajawali Press, 2002), h.3

³ Hans Kelsen, *Principles of International Law*, ed. Robert W. Tucker (New York: Hotf reinhart and Winston Inc, 1967), h. 189.

⁴ Michael Akehurt, *Modern Introduction to International Law*, Edisi ke- 4 (London: George Allen University, 1982), h.14

asing (atau negara lain), khususnya untuk wilayahnya. Agar hubungan komunitas di wilayahnya dapat berjalan dengan efektif, tentu diperlukan peran serta pemerintah untuk mewujudkan kekuasaan negara tersebut, pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh negara diberi tugas untuk mengorganisir penduduk di wilayahnya. Tugas pemerintah juga untuk memelihara dan menegakkan kedaulatan serta melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.⁵

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mengglobal, telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang menjadi semakin dinamis, interaksi antara masyarakat tidak terbatas hanya pada ruang lingkup antar negara saja, tetapi juga sudah meliputi pergaulan antar bangsa. Hubungan antar bangsa sudah mencerminkan adanya hubungan saling ketergantungan sebagai bagian dari masyarakat internasional.⁶

Adanya perkembangan bangsa yang cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mengakibatkan semakin tingginya mobilitas pergerakan manusia melewati batas-batas negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan era globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat dimasa kini tidak dapat

⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. (Jakarta: BPHN, 2012), h. 69.

⁶Yudi Pratikno, *“Analisis dan Evaluasi Undang-undang No.1 Tahun 2006 tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana”*, Disertasi (Bandung: Universitas Padjajaran, 2007), h. 1

terelakkan dan sudah dirasakan pengaruhnya hampir di semua negara, terutama di negara-negara berkembang pada umumnya.

Perkembangan tersebut disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia antara lain peningkatan hubungan masyarakat yang pesat di bidang perekonomian dan di bidang perdagangan internasional,⁷ tetapi juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara jika dikaitkan dengan pelanggaran tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi sebuah negara, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pencucian uang.⁸

Tindak pidana yang bersifat transnasional mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain. Sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya sulit dilakukan tanpa kerjasama dan harmonisasi kebijakan dengan negara lain. Oleh karena itu, untuk menanggulangi dan memberantasnya, memerlukan hubungan baik dan kerjasama antar negara, guna saling memberikan bantuan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana yang bersifat transnasional berdasarkan hukum masing-masing negara.

⁷ Romli Atsasmita, *Kapita Selekta hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung : Mandar Maju, 1995) h. 1

⁸ Mosgan Situmorang, *Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik* , *Laporan Hasil Penelitian* (Jakarta: BPHN, 2012) h. 2-3

Adanya permasalahan hukum antar negara tersebut menyebabkan besar kemungkinan seseorang yang harus menjalani proses peradilan pidana di luar wilayah yang bersangkutan. Dengan adanya konsep *sovereignty* dari suatu negara, tidak dapat dilakukan tanpa adanya koordinasi dan bantuan hukum dari negara tujuan. Beberapa kasus aktual yang terjadi saat ini seperti tersangka kasus korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan aset hasil korupsi yang berada di luar negeri merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat menangkap tersangka atau terpidana di luar yurisdiksi sistem peradilan Indonesia sekaligus mengembalikan aset hasil tindak korupsi tersebut. Timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi Internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengatasinya tidaklah cukup hanya dilakukan oleh negara secara sendiri-sendiri, tetapi dibutuhkan kerjasama yang terpadu baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu lembaga hukum yang dipandang dapat menanggulangi kejahatan yang berdimensi internasional ini adalah ekstradisi. Oleh karena itu, lembaga ekstradisi muncul ke permukaan seolah-olah ekstradisi sebagai lembaga hukum yang ampuh untuk menyelesaikannya.⁹

Namun ekstradisi juga mempunyai beberapa kendala, kendala-kendala ekstradisi pada abad ke-19 dan pada abad ke-20 ini meliputi kendala yang bersifat prosedural (diplomatik). Kendala yang bersifat yudisial menyangkut proses penetapan

⁹ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2004), h. 127

oleh pengadilan dari negara yang dimintakan ekstradisi dan memerlukan pemeriksaan bukti-bukti secara teliti sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat serta beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi oleh negara peminta ekstradisi sesuai dengan ketentuan perjanjian ekstradisi yang diakui secara internasional.

Kendala yang bersifat diplomatik adalah pelaksanaan perjanjian ekstradisi, yang dalam kenyataannya sering menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara kedua negara yang terlibat di dalam pelaksanaan ekstradisi tersebut. Disamping itu, jika tidak ada perjanjian ekstradisi antar kedua negara sebelumnya. Maka pemulangan koruptor dan pengembalian aset tidak dapat dilakukan.

Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) muncul untuk menanggulangi kejahatan bersifat transnasional atau Internasional sebagai akibat kurang efektifnya pelaksanaan perjanjian ekstradisi yang selama ini dilakukan antar negara-negara yang terlibat di dalamnya.

Sebagaimana yang kita ketahui hukum Islam juga tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah dan masalah agama, tetapi juga mengatur hubungan antar negara, baik di waktu perang maupun di waktu damai. Terdapat pula pendirian badan Internasional yang bertugas untuk menyelesaikan pertikaian. Islam menyerukan agar seluruh umat manusia yang berbeda suku, bangsa, dan agama untuk menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara menyeluruh sehingga dapat terwujud kehidupan

yang aman, damai dan saling menghargai antara sesama negara dimuka bumi ini.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran Surat Al-Maaidah/05: 02.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat siksa-Nya.”¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul “*Efektifitas Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/Studi Kasus Terhadap Pemulangan Koruptor yang Melarikan diri ke Luar Negeri)*”

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta:Departemen Agama RI, 2001). h. 157

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai Efektifitas Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) terhadap Pemulangan Koruptor yang Melarikan diri ke luar negeri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) oleh otoritas pusat terhadap pemulangan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) yang dihadapi oleh otoritas pusat untuk memulangkan koruptor ke Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Alun Jones dalam bukunya yang berjudul *Jones on Extradition and Mutual Assistance* membahas tentang ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana berkaitan proses dan kasus hukumnya. Penulis juga menjelaskan prinsip umum termasuk bagaimana hukum berhubungan dalam suatu area contohnya hak asasi manusia dan isu-isu yang berkaitan.

John R. W. D Jones dan Rosemarry Davidson yang berjudul *Extradition and Mutual Legal Assistance Handbook* membahas tentang perjanjian yang berdimensi multilateral dan regional. Selain itu penulis juga membahas tentang pentingnya bantuan timbal balik, bertukar-bentuk bantuan timbal balik, dan perkembangan bantuan timbal balik.

Clive Nicholls QC, Clare Montgomery QC, Julian B. Knowles QC, Annand Doobay, dan Mark Summers dalam bukunya *Nicholls, Montgomery, and Knowles on The Law of Extradition and Mutual Legal Assistance* edisi ketiga membahas tentang kerjasama Internasional dalam masalah pidana dalam hal ini bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Penulis juga menjabarkan kejahatan lintas negara serta proses pelayanan bantuan timbal balik.

Noer Indriati dalam jurnalnya membahas tentang Bantuan Hukum timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) sebagai instrumen pemberantasan kejahatan Internasional. *Mutual legal Assistance* muncul karena pemberantasan kejahatan tidak cukup dengan perjanjian ekstradisi.

Bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana telah banyak disepakati dalam lingkup internasional yaitu *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* tahun 2003 dan *United Nations conventions Against Transnational Organized Crime* tahun 2000.

Selain dari referensi di atas, penulis juga mempersiapkan rujukan lain seperti Undang-Undang no. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan hukum timbal balik dan buku-buku yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga penulis berharap

mampu memaparkan tentang perkembangan bantuan hukum timbal balik di Indonesia, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Jamin Ginting dalam Jurnal Dinamika Hukum yang berjudul *Perjanjian Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia* menjelaskan tentang bantuan timbal balik dan ekstradisi sebagai dasar kesepakatan untuk pengembalian aset.

Adapun penulisan skripsi mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana terkait pemulangan koruptor belum pernah dimunculkan. Selain itu skripsi ini lebih menitikberatkan pada kehadiran koruptor yang melarikan diri ke luar terkait penyelidikan lebih lanjut di pengadilan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui efektifitas Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) terhadap pemulangan koruptor yang melarikan diri keluar negeri.
- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh otoritas pusat dalam menerapkan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal*

Assistance in Criminal Matters) terhadap pemulangan koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk lebih mengkaji hukum pidana terutama dalam masalah hubungan timbal balik, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan rujukan bagi peminat yang ingin mendalami tindak pidana korupsi.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah intelektual dan diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi otoritas pusat, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan umum tentang Pidana

1. Pengertian Pidana Menurut Para Ahli

a. Pengertian Pidana menurut Van Vamel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu perbuatan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Pengertian Pidana Menurut Simons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu keputusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Pengertian Pidana Menurut Sudarto

Pidana adalah penderitaan dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

d. Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Pengertian pidana menurut Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

f. Pengertian Pidana Menurut Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang a) terdapat pada pelanggaran aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana

1. *Mala in seda dan mala prohibita*

Pembedaan delik ke dalam *mala in seda* dan *mala in prohibita*. Kelsen dalam bukunya, teori Murni tentang Hukum menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum melekatkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi,

¹Pengertian Ahli. www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html?m=1# (13 Agustus 2015).

suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan antara *mala in seda* dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.²

2. Delik omisi dan delik Comisi

Dalam ilmu pengetahuan pidana sesungguhnya dikenal pula berbagai pembedaan delik, diantaranya delik omisi dan delik comisi yang didasarkan atas dasar cara melakukan tindak pidana. Delik comisi yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana, sedangkan delik omisi yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan.

3. Delik formil dan delik materil

Atas dasar perumusannya, delik dibedakan antra delik formal dan delik materil. Delik formil menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik materil menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materil, peristiwa dianggap telah terjadi jika ada yang mati. Maka dalam perumusan KUHP disebutkan: "... barangsiapa karena perbuatannya menyebabkan matinya orang..." soal bagaimana cara hingga seseorang

²Hans Kelsen, *Teori Murni tentang Hukum, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Judul Asli *General Theory of Law*, Alih Bahasa Soemardi (Jakarta: Rimdi Press. 1995), h. 51

itu mati soal kedua. Soal pertama adalah adanya orang yang mati. Berbeda dengan pencurian yang merupakan delik formil, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk dipinjam atau dimiliki, proses pindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil. Oleh karena itu, dalam delik formil, apa yang menjadi objek adalah soal kedua, soal pertama adalah telah terjadinya perpindahan hak atas suatu benda.

4. Delik mandiri dan delik berlanjut

Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri (*zelfontadige delicten*) dan delik berlanjut (*voortgezette delicten*). Dilihat dari bentuk kesalahan petindak, delik dibedakan antara delik khusus dan delik umum. Dilihat dari cara penuntutan, delik dibedakan ke dalam delik aduan dan delik yang penuntutannya karena jabatan.³

5. Tindak Pidana Khusus Dan Tindak Pidana Umum

Selain pembedaan-pembedaan di atas, dilihat dari sumber hukum tempat dirumuskannya tindak pidana, di dalam hukum pidana dikenal pula perbedaan antara hukum pidana khusus dan pidana umum. Sebagian besar ahli mengatakan bahwa hukum pidana umum adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab

³EY. Kanter dan R. Siantuari, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Bandung: Alumni AHM-P{THM, 1982), h. 21

Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan tentang hukum pidana yang diatur di luar KUHP.

6. Kejahatan Umum Dan Kejahatan Politik

Walaupun secara normatif tidak dikenal istilah tindak pidana/delik politik, di dalam praktek dan dunia akademis dikenal adanya istilah delik politik. Menurut Remelink, kejahatan politik dibedakan dengan kejahatan pada umumnya dilihat dari pelaku, yaitu mereka yang dengan kesadaran menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat tentang negara atau hukum yang mereka anut lebih luhur daripada pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara yang bersangkutan. Perbedaan kedua adalah menyangkut pelaku dimana jika kejahatan umum dilakukan dengan motivasi kepentingan diri sendiri, para pelaku kejahatan dimotivasi oleh tujuan tertentu diluar kepentingan sendiri.⁴

3. Unsur Perbuatan Hukum Dalam Hukum Pidana

Perbincangan tentang sifat melawan hukum sebagai salah satu syarat adanya kesalahan menjadi ramai dibicarakan berkaitan dengan adanya kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Istilah melawan hukum sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah Hukum perdata yaitu “*onrechtmatigheid*” yang berarti perbuatan melawan hukum. Untuk

⁴Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 73

terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman⁵, harus dipenuhi empat unsur yaitu:

- a. Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d. Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpa kepadanya.

4. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Pidana

Dalam tindak pidana korupsi perkataan “melawan hukum” hanya menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dengan kata lain, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sifat melawan hukum perbuatan itu direpresentasikan dengan kata-kata “secara melawan hukum” itu sendiri, sedang dalam pasal yang lain digunakan istilah yang lain lagi. Misalnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sifat melawan hukumnya termaktub dari istilah “menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Demikian pula misalnya Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sifat melawan hukumnya direpresentasikan dengan perkataan “dengan maksud supaya pegawai

⁵Rosa Agustina, dalam Juniver Ginsang, “ *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006*, Disertasi (Bandung: PPs Universitas Padjajaran, 2010) h. 116-117.

negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana, maka dengan kriteria apapun perbuatan itu tidak akan menjadi suatu tindak pidana. Misalnya, jika majelis hakim dalam suatu putusan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan itu pasti bukan tindak pidana apapun, termasuk bukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ataupun ketentuan pidana lainnya. Begitu penting sebenarnya posisi pertimbangan tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur melawan hukum ini dalam suatu tindak pidana, yang boleh jadi tanpa disadari mempengaruhi penerapan ketentuan pidana lainnya dalam kasus itu.

Konsepsi di atas membawa pada pemahaman bahwa “menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah peristilahan yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menggambarkan sifat melawan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan tindak melawan hukum menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31

Tahun 1999, mengingat pasal tersebut menggunakan istilah “melawan hukum” untuk menggambarkan sifat melawan hukumnya, maka secara *mutatis mutandis*, perbuatan itu juga tidak dapat dipandang sebagai bentuk perbuatan melawan hukum menurut pasal manapun, termasuk bukan perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.⁶

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

1. Pengertian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Bantuan hukum Timbal balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan *Mutual Legal Assistance* dilatar belakangi adanya kondisi faktual sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana diantara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.⁷

⁶Cecep Arifuddin. http://www.fhumj.org/berita_info/berita_detail/12 (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta) (10 Agustus 2015)

⁷Elisatris Gultom, “*Mutual Legal Assistance dalam kejahatan Transnasional Terorganisasi*”elisatris.wordpress.com (11 Desember 2014).

Mutual Legal Assistance muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional)⁸. Hal ini sangat tidak wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang dimensinya nasional, dalam pengertian dampak dari kejahatan tersebut sifatnya nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain.

Secara umum terdapat dua alasan bagi suatu negara untuk melakukan ekstradisi, pertama *goodwill* dan keprihatinan Internasional. Suatu perjanjian ekstradisi yang terjadi antara negara yang tidak mempunyai perjanjian hanya terjadi karena komitmen internasional. Kedua, komitmen dimungkinkan karena adanya perjanjian antar negara. Sementara, terdapat tiga alasan bagi suatu negara melaksanakan *Mutual Legal Assistance* yaitu dua diantaranya sama dengan ekstradisi, dan yang ketiga adalah adanya persetujuan internasional dengan interpol yang dilakukan oleh pihak kepolisian suatu negara.⁹

Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana *Mutual Legal Assistance* dianjurkan dalam berbagai pertemuan Internasional dan Konvensi PBB, misalnya dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerjasama Internasional; antara lain, dalam

⁸Romli Atsasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), h. 7

⁹Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com> (11 Desember 2014)

bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai Undang-undang yang merupakan payung hukum dari *Mutual Legal Assistance*, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 2006 yang berlaku sejak 3 Maret 2006.¹⁰

Mutual Legal Assistance merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk diantara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap kejahatan memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA), hanya kejahatan yang berdimensi internasional serta kejahatan yang memenuhi asas kejahatan ganda (*double criminality*) saja yang memerlukan penanganan melalui *Mutual Legal Assistance*.¹¹

Maksud dari asas kejahatan ganda (*double criminality*) adalah kejahatan yang dijadikan atau peristiwa pidana menurut sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara yang diminta)¹² sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam pidana.

¹⁰Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com> (11 Desember 2014)

¹¹Elisatris Gultom, “*Mutual Legal Assistance dalam kejahatan Transnasional Terorganisasi*”elisatris.wordpress.com (11 Desember 2014).

¹²I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 29.

Pentingnya diterapkan *Mutual Legal Assistance* dalam penanganan kejahatan yang sifatnya *double criminality* tidak terlepas dari kenyataan bahwa pengaruh dari kejahatan ini dirasakan oleh lebih dari satu negara. Oleh karena itu, penanganan kejahatan transnasional terorganisasi yang sifatnya sepihak (hanya oleh satu negara) hanya akan menimbulkan masalah lain yaitu dilanggarnya kedaulatan suatu negara, yang juga perlu dicatat adalah sejumlah ketentuan dalam Piagam PBB yang mengakui bahwa perlakuan individu warga negara kini bukan lagi urusan domestik dan bahwa penyangkalan hak asasi manusia terhadap seorang warga tidak lagi dapat bersembunyi di balik kedaulatan negara.¹³

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC pada tanggal 18 April 2006 melalui UU Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, telah memberikan dasar bagi berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bentuk partisipasi komitmen masyarakat dunia untuk melawan kejahatan korupsi. Konvensi ini pula yang menjadi landasan dari upaya penegakan hukum melalui kerangka kerjasama internasional, dalam bentuk bantuan timbal balik.

Secara pro-aktif, pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Maret 2006, telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada tanggal 3 Maret 2006 (“UU MLA”). Keberadaan Undang-undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam

¹³Philip C. Jessup. *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, terj. Fitria Mayasari. Cet. I (Bandung: Nuansa, 2012), h. 53

meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta. Dalam UU *Mutual Legal Assistance* tersebut, bantuan timbal balik (“bantuan”) dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, dimana apabila pemerintah Indonesia dan negara lain belum memiliki perjanjian pemberian bantuan maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip repsositas.

Adapun lingkup pelaksanaan bantuan, terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Menyampaikan surat;
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. Perampasan hasil tindak pidana;

- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi pidana yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/ atau
- k. Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-undang ini.

Disamping pengaturan mengenai lingkup pelaksanaan bantuan, berdasarkan Undang-undang MLA ini memberikan pengecualian, yaitu tidak memberikan kewenangan pelaksanaan bantuan untuk (i) pelaksanaan ekstradisi atau penyerahan orang; (ii) penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang; (iii) pengalihan narapidana; atau (iv) pengalihan perkara. Terhadap bantuan yang dimintakan, dapat dilakukan penolakan bantuan yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas tindak pidana politik, tindak pidana militer, tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pembedaan, tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak dapat dituntut, bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik bantuan tersebut dapat merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan, dan hukum nasional, negara asing, tidak dapat memberikan jaminan

bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan, apabila negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta, tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati, dan apabila persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang, atau membebani kekayaan negara. Apabila pemerintah Indonesia menolak pemberian bantuan, maka menteri Hukum dan HAM memberikan dasar penolakan tersebut kepada negara peminta.¹⁴

Pengaturan selanjutnya adalah mengenai mekanisme pengajuan permintaan maupun pengajuan penerimaan bantuan. Pengajuan selanjutnya adalah mengenai mekanisme pengajuan permintaan maupun pengajuan penerimaan bantuan. Pengajuan permintaan bantuan dimana Pemerintah Indonesia akan berlaku sebagai Negara Peminta (***Requesting Party***) dapat dilakukan secara langsung (Kementerian Hukum dan HAM) maupun melalui jalur diplomatik (Kementerian Luar Negeri). Pengajuan permintaan dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, Kapolri maupun komisi Pemberantasan Korupsi (dalam kaitan tindak pidana korupsi), dengan persyaratan substansi dan administrasi. Permohonan bantuan dapat berupa antara lain Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi Orang, Bantuan untuk mendapatkan alat bukti,

¹⁴Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik* (Jakarta: BAPPENAS, 2013), h. 13

bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia, bantuan untuk permintaan dikeluarkannya Surat Perintah di negara asing dalam mendapatkan alat bukti, bantuan untuk penyampaian surat, bantuan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan, dan Transit yang dalam penahanan.

Terkait mekanisme penerimaan bantuan, pemerintah Indonesia akan berlaku sebagai negara yang diminta bantuan (*Requested Party*) yang dikoordinasinya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penerimaan bantuan dari negara lain dapat dilakukan secara langsung maupun melalui saluran diplomatik dengan persyaratan administrasi dan substantif. Permintaan dari negara lain akan dilanjutkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat kepada Polri atau Jaksa Agung. Lingkup permintaan bantuan yang diberikan kepada negara peminta, antara lain adalah bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan pernyataan, dokumen, dan alat bukti lainnya secara sukarela, bantuan untuk penggeledahan dan penyitaan barang, atau harta kekayaan, bantuan penyampaian surat, dan bantuan untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Negara Peminta.

Dalam *article 18 Transnational Organized Crime Convention* merupakan dasar hukum bagi lembaga *Mutual Legal Assistance*, bahkan dalam ayat 3 diuraikan secara terinci lingkup *Mutual Legal Assistance*. Selengkap *article 18* ayat 3 *Transnational Organized Crime* menyatakan: *Mutual Legal Assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:*

- a. *Taking evidence or statement from persons;*
- b. *Effecting service of judicial documents;*
- c. *Executing searches and seizures, and freezing;*
- d. *Examining objects and sites;*
- e. *Providing information, evidentiary items and expert evaluations;*
- f. *Originals or certified copies of relevant documents and record, including government, bank financial, corporate or business records;*
- g. *Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- h. *Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- i. *Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested Party.*

Sebagai perbandingan Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1998 merinci lingkup perjanjian timbal balik dalam masalah pidana yaitu:

- a. Memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
- b. Meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
- c. Melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
- d. Memeriksa objek dan lokasi;
- e. Menyediakan keterangan dan barang bukti;
- f. Menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
- g. Mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Dalam perundang-undangan nasional, kebutuhan akan perlunya dibentuk *Mutual Legal Assistance* dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, salah satunya diwujudkan dalam pasal 44 dan 44 A Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah UU No. 25 Tahun 2003 (UU TPPU), yang menyebutkan: Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mutual Legal Assistance merupakan lembaga yang relatif efektif untuk diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi, dibandingkan dengan lembaga ekstradisi. Kelemahan penggunaan lembaga ekstradisi dikemukakan oleh Watanabe, sebagaimana dikutip oleh Romli Atsasmita, antara lain:

- a. Perbedaan hukum nasional baik hukum substantif maupun hukum ajektif (acara);
- b. Mekanisme pelaksanaannya, dan

- c. Struktur organisasi pemerintahan dari negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹⁵

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tidak setiap negara memiliki perjanjian ekstradisi dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan tertentu. Ketiadaan perjanjian ekstradisi ini tentunya akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku yang tinggal di negara lain.

Kemungkinan tidak dibentuknya perjanjian ekstradisi diantara negara-negara dapat pula dilihat dalam Pasal 16 ayat (4) *Transnational Organized Crime Conventions*. Sekalipun demikian konvensi memberikan jalan keluar yaitu jika perjanjian ekstradisi tidak dibentuk, maka *Transnational Organized Crime Conventions* dapat dianggap sebagai dasar pengekstradisian sepanjang menyangkut kejahatan yang diatur dalam konvensi.

Mutual Legal Assistance memiliki cakupan/ruang lingkup yang sangat luas (sebagaimana diatur dalam article 18 *Transnational Organized Crime*) mulai dari proses pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan sebagai bentuk kejahatan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, nampak jelas bahwa *Mutual Legal Assistance* memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan transnasional terorganisasi, khususnya berkaitan dengan

¹⁵Romli Atsasmita. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), h. 71

kejahatan yang memenuhi asas *double criminality* sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) sub 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam pelaksanaan kerjasama ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* didasarkan 3 (tiga) hal yang saling terkait satu sama lain, yaitu: ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, dan konvensi dan kebiasaan Internasional.

Kerjasama ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.

Dalam mekanisme ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance*, suatu negara akan menunjuk suatu lembaga yang atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang menerima atau mengajukan permintaan resmi ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* dan bertanggung jawab atas proses ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance*.

Dalam pelaksanaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas sentral (*central utority*) dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian. Hal ini berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pengembalian keterangan. Sebaliknya, Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan kerjasama *Mutual Legal Assistance* dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan itu dapat mengganggu kepentingan nasional atau berkaitan dengan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan

suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang. Komunikasi dalam kerjasama MLA dapat dilakukan, baik melalui jalur diplomatik maupun melalui jalur *central authority*. Ada juga negara yang melakukan kerjasama *Mutual Legal Assistance* hanya melalui jalur diplomatik, seperti Malaysia.¹⁶

Salah satu aspek dari *Mutual Legal Assistance* adalah *sharing forfeited shared*. Aset yang disita sebagian dibagikan kepada negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut, baik untuk biaya operasional atau lainnya. Hal ini merupakan suatu masalah baru. Indonesia memiliki ketentuan mengenai hal ini dalam pasal 57 UU No.1 tahun 2006, namun beberapa negara, seperti Thailand, tidak. Pada Amerika Serikat, masalah ini sudah berjalan sejak lama (1989). Sebagai contoh, pada tahun itu ada dana sebesar USD 188 juta dibagikan kepada negara lain yang membantu Amerika dalam *Mutual Legal Assistance*. Besarnya bagian ini tergantung dari peranan negara tersebut. Kalau negara yang membantu mempunyai peranan yang esensial maka dapat memperoleh 50-80% dari aset yang dirampas. Misalnya, negara tersebut mengembalikan aset yang disita dan membela di pengadilan. Kalau bantuan bersifat substansial seperti melaksanakan permintaan Amerika, dan membekukan aset, maka negara tersebut dapat bagian sebesar 40-50%. Sementara jika peranan negara asing tersebut hanya "*facilitating assistance*" misalnya memberikan informasi, menyediakan dokumen bank akan memperoleh bagian sampai 40%. Indonesia perlu mengundang dan membuat peraturan pelaksanaan soal ketentuan pasal 57

¹⁶Kerjasama Internasional dalam Masalah Pidana, strdoall.blogspot.com (11 Desember 2014).

mengenai masalah *sharing profited asset* ini. Ini menjadi pembuka peluang keberhasilan mengejar barang bukti dan hasil tindak pidana yang berada di luar negeri menjadi semakin besar. Nilai besaran jatah negara yang membantu ini dapat dirundingkan oleh Menteri Hukum dan HAM sudah tentu dengan mempertimbangkan peranan negara tersebut.¹⁷

Hal yang patut disayangkan, sekalipun peranan *Mutual Legal Assistance* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional terorganisasi cukup penting, tetapi pemerintah Indonesia belum banyak menjalin kerjasama *Mutual Legal Assistance* dengan negara lain, padahal kejahatan transnasional terorganisasi semakin lama semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.¹⁸

Meskipun bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi masih terbuka kemungkinan untuk menangani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan mengadakan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana, belum semua negara mampu menerapkan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana, karena dalam penerapan sering mengalami hambatan, khususnya yang menyangkut administrasi penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di depan pengadilan.¹⁹

¹⁷ Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com> (11 desember 2014).

¹⁸Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com> (11 desember 2014).

¹⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. (Jakarta: BPHN, 2012), h. 25-26

2. Sejarah Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)

Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutal Legal Assistance in Criminal Matters*) adalah salah satu bentuk kerja sama bentuk kerjasama internasional selain ekstradisi atau perjanjian pemindahan narapidana (*Transfer of Sentenced Person*).

Pada awalnya *Mutual Legal Assistance* berawal dari kerjasama antar negara dalam suatu proses saling membantu dalam penyidikan dalam masalah pidana yang bermula dari kerjasama antar kepolisian maupun “*letters rogatory*”²⁰ yang merupakan suatu sistem permintaan bantuan yang didasarkan pada sikap saling menghargai dalam rangka mendapatkan alat bukti, yang selanjutnya berkembang menjadi suatu bantuan perjanjian dan berbagai bantuan lainnya. *Letters rogatory* merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pengadilan suatu negara untuk memperoleh bantuan dari pengadilan negara lain.²¹

Letters rogatory dikarenakan berdasarkan prinsip kedaulatan, pengadilan suatu negara dilarang untuk melaksanakan kekuasaan di luar negeri untuk kepentingan persidangan, sehingga suatu negara harus mengajukan permintaan

²⁰Robert Cyrrer dan Hakan Friman, *An Introduction to Incriminal Law and Procedure* (London: Cambridge University Press), h. 102.

²¹*International Assistance*, <http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fps-sfp/fpd/ch43.html> (11 Desember 2014), h. 1.

terlebih dahulu kepada negara yang diminta apabila ingin mendapatkan alat bukti tersebut.²²

3. Prinsip-prinsip dalam Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)

a. Prinsip Resiprositas

Resiprositas merupakan prinsip dasar dalam bantuan hukum timbal balik, dimana berdasarkan prinsip ini negara harus saling memberikan bantuan yang seimbang, hal ini juga berkaitan dengan pararealisme antara kedua negara baik sebagai negara peminta maupun negara diminta.

b. Prinsip *Dual Criminality*

Prinsip lain dalam *Mutual Assistance* adalah prinsip *dual criminality* yaitu bahwa bantuan diberikan terhadap perbuatan yang diakui sebagai tindak pidana dalam hukum nasional negara yang meminta maupun negara yang diminta. Akan tetapi dalam perkembangannya ketentuan hukum internasional mendorong negara-negara untuk menghapus ketentuan- ketentuan ini sebagai contoh UNCAC dan *The Universal Counterterrorism Treaties* tidak mengisyaratkan *dual criminality*, sepanjang permohonan bantuan tersebut tidak terkait dengan upaya paksa.

²²*International Assistance*, <http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fps-sfp/fpd/ch43.html> (11 Desember 2014), h. 1.

c. Prinsip kekhususan (The Rule of Speciality)

Penerapan prinsip ini dimaksudkan agar informasi atau alat bukti yang diminta oleh negara peminta tidak digunakan untuk proses investigasi, penuntutan, atau proses hukum selain terhadap kasus yang dimintakan.

d. Penjatuhan pidana dan jaminan proses peradilan yang adil

Permohonan *Mutual Legal Assistance* apabila terkait dengan ancaman pidana mati atau apabila dikabulkannya permohonan *Mutual Legal Assistance* dapat menempatkan seseorang dalam suatu bahaya penyiksaan atau menjadi subjek dari perbuatan yang kejam , tidak manusiawi serta merendahkan harkat dan martabat manusia.

e. Prinsip *ne bis in idem* (tidak boleh diadili untuk kedua kalinya)

Berdasarkan prinsip ini bantuan tidak dapat diberikan jika kasus tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga seseorang tidak dapat dituntut/dihukum untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama.²³

4. Dasar Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

Terkait kerjasama Pemerintah Indonesia dalam kerangka bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 1 Tahun

²³ Pasal 6 huruf b UU No. 1 Tahun 2006,

2006 (UU MLA) dan pelaksanaan ketentuan beberapa konvensi terkait (UNCAC, UNTOC, OECD, dan lain-lain). Dalam hal ini pemerintah Indonesia juga telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral maupun multilateral mengenai kerjasama MLA antara lain dengan:

- a. *ASEAN Declaration on Transnational Crimes* pada tanggal 20 Desember 1997, yang meliputi kerjasama penanganan kerjasama regional terhadap kejahatan transnasional, antara lain seperti terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan orang, kejahatan lingkungan, migrasi ilegal, dan lain-lain
- b. Perjanjian dengan Pemerintah Australia melalui UU No.1 Tahun 1999 tentang Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Treaty between the republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in criminal matters*);
- c. Perjanjian pemerintah RI dan RRC melalui UU No. 8 Tahun 2006 tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the people's of China on Mutual Legal Assistance in criminal matters*);
- d. Perjanjian kerjasama antar negara ASEAN (*ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty*) melalui UU No. 15/2008 tentang Pengesahan Perjanjian tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*Treaty on Mutual Legal Assistance in criminal matters*)- pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja,

Indonesia, Laos, Malaysia, Pilipina, Singapura, dan Vietnam yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur, Malaysia;

- e. Perjanjian Pemerintah RI dan RRC-Hong Kong melalui UU No. 3 Tahun 2012 tentang pengesahan Persetujuan antara pemerintah republik Indonesia dan pemerintah daerah Administrasi khusus Hong Kong Republik Rakyat Cina tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah pidana (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong special administrative region of the people's republic of china concerning Mutual Legal Assistance in criminal matters*);
- f. Beberapa perjanjian antara pemerintah Indonesia antara lain dengan pemerintah Korea Selatan (proses penandatanganan sudah dilakukan namun belum diratifikasi), Pemerintah India (masih dalam proses ratifikasi), pemerintah Uni Emirat Arab (dalam proses penandatanganan), pemerintah Vietnam (dalam proses penandatanganan), pemerintah Brazil (dalam proses negosiasi);
- g. Beberapa perjanjian kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti lembaga kejaksaan, *Financial Intelligence Unit*, Kepolisian, dan KPK.

Sedangkan terkait perjanjian dalam rangka ekstradisi, pemerintah Indonesia telah melaksanakan perjanjian antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kerajaan Malaysia (*Treaty between RI and the government Chambers of Malaysia relating to Extradition*) pada tanggal 7 Juni 1974;

- 2) Pemerintah Republik Philipina (*Extradition Treaty between RI and the Republic of Philippines*) pada tanggal 10 February 1976;
- 3) Pemerintah kerajaan Thailand (*Treaty between RI and the Kingdom of Thailand relating to extradition*) pada tanggal 29 Juni 1976;
- 4) Pemerintah Australia (*Extradition Treaty between RI and Australia*) pada tanggal 22 April 1992;
- 5) Pemerintah Republik Korea (*Extradition Treaty between RI and the Republic of Korea*) pada tanggal 28 November 2000.²⁴

5. Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Perspektif Islam

Hukum Islam juga mengatur hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral antar negara, hal itu diatur dalam fikih siyasah dauliyah.

Fikih siyasah juga mengenal adanya hubungan internasional antar negara yang mengatur hubungan-hubungan antar negara. Dalam fikih siyasah hubungan antar negara biasa dikenal dengan istilah siyasah Dauliyah. Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang.²⁵ Sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hubungan Internasional, masalah teritorial, nasionalitas, dan ekstradisi tahanan pengasingan

²⁴Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik* (Jakarta: BAPPENAS, 2013), h. 40-41.

²⁵Abdul Wahab Khallaf. *Politik Hukum Islam* (Yogyakarta: tiara Wacana, 2005), h. 71

tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga, mengurus masalah kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud dan qisas, atau dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara (hukum internasional).

Dasar-dasar perjanjian internasional dalam siyasah dauliyah sebagai berikut:²⁶

1. Kesatuan umat manusia

Meskipun manusia berbeda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama akan tetapi merupakan satu kesatuan, karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan semua dari Adam. Dengan demikian perbedaan diantara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.

2. Hubungan Kerjasama yang Baik dan Adil

Ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, walau terhadap musuh sekalipun, kita wajib bertindak adil. Banyak ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan antara lain: QS. An-Nisa/04: 135.

²⁶Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah* (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 216

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu hanya ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”²⁷

3. Persamaan Umat Manusia

Pada dasarnya manusia memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama, oleh karena itu harus diperlakukan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001) h. 179

4. Kehormatan Manusia

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara.

5. Mengutamakan Perdamaian

Fikih siyasah dauliyah mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya. Seperti perdamaian. Perang bisa saja timbul sekali-kali, akan tetapi diharapkan adalah menghindari atau mengurangi terjadinya perang. Sekalipun perang sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, tetapi terpaksa harus dilaksanakan dalam kondisi-kondisi di dalam dan di luar negeri tertentu. Konsekuensi dari asas bahwa hubungan Internasional dalam Islam adalah perdamaian saling membantu dalam kebaikan.

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Anfal/08: 61.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ

Terjemahnya :

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.²⁸



²⁸ Departemen RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 193

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis sosiologi (*sociologys legal research*) yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan perusahaan asuransi. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM Makassar, khususnya kasus koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan yuridis normatif (hukum positif) yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder sebagai bahan utama, sedangkan spesifikasi penelitian data kepustakaan tentang problematika dalam pemulihan lingkungan. Pendekatan terhadap hukum normatif, mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat

tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu situasi konkrit.

2. Pendekatan yuridis sosiologis (*sociologys legal research*) yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Aparat Penegak hukum dan hak asasi manusia yang terlibat dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

2. Sampel

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah terkait, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah dibahas.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya, yakni Humas Kemenkumham dan Humas KPK

b. Observasi

Yaitu melakukan pencatatan peranan *Mutual Legal Assistance* dan pelaksanaan dari Undang-undang.

c. **Studi Dokumentasi**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi keputusan yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Serta menelaah buku-buku dan hasil penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitian inilah yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penulis dalam pengolahan dan menganalisa data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dan membandingkan perbedaaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
3. Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

(Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

KPK menelisik seluruh dugaan kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin melalui Grup Permai dengan sejumlah anak perusahaannya. Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis di persidangan beberapa waktu lalu mengatakan, Grup Permai dan anak perusahaannya berperan menggiring proyek-proyek pemerintah agar tendernya dimenangkan mereka yang membayar perusahaan itu.

Dalam kasus dugaan suap wisma atlet misalnya, PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai, berperan membantu PT Duta Graha Indah (PT DGI) Tbk memenangkan tender proyek. Upaya itu berbuah fee yang harus diberikan kepada petinggi Grup Permai, salah satunya Nazaruddin.¹

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan sejak Senin sore, 23 Mei 2011 mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sudah kabur ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Padahal, Direktorat Jenderal Imigrasi baru menerima surat permintaan pencekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore, 24 Mei 2011 pukul 18.00

¹Icha Rastika. KPK sidik kasus Korupsi yang Diduga Libatkan Nazaruddin. <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/28/1737242/KPK.Sidik.Kasus.Korupsi.Lainyang.Diduga.Libatkan.Nazaruddin>. (KOMPAS). (10 Agustus 2015)

WIB. Sudah 24 Mei dicegah, tapi Nazaruddin pada 23 Mei sudah ke Singapura dengan Garuda

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi mengirimkan surat permintaan larangan berpergian ke luar negeri atas nama mantan bendahara Umum partai Demokrat M. Nazaruddin ke Ditjen Imigrasi. Nazaruddin diduga terkait kasus dengan suap pembangunan wisma atlet SEA GAMES di Palembang. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Mindo Rosalinda Manurung dan petinggi DGI, Muhammad El Idris sebagai tersangka.²

Pengamat hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat, ada beberapa alasan yang menjadikan Singapura sebagai negara pelarian favorit para koruptor Indonesia. Pertama, banyaknya jadwal penerbangan menuju Singapura. Dalam satu hari setiap jam bisa ada Garuda, Singapore Airlines, belum lagi maskapai lainnya. Kemudahan akses ke Singapura tersebut belum tentu didapatkan jika mereka memilih pergi ke negara anggota ASEAN lainnya seperti Thailand.

Kedua, para pelarian tersebut mencontoh pelarian-pelarian sebelumnya yang cenderung memilih Singapura. Citra Singapura yang terkenal "ramah" untuk para

²Tempo. <http://nasional.tempo.co/read/news/2011/05/26/063337023/nazaruddin-kabur-ke-singapura>

pelarian membuat mereka memilih ke sana. Para koruptor melihat preseden atau contoh, tidak ada orang yang diminta pemerintah Indonesia dikembalikan oleh Singapura. Seolah pemerintah Singapura memberikan perlindungan, padahal belum tentu.

Ketiga, dengan berdiam di Singapura, para pelarian itu masih dapat memonitor perkembangan di Indonesia. Akses komunikasi seperti televisi, BlackBerry, masih menjangkau Singapura. Memonitor Indonesia dari Singapura itu mudah, bisa melalui TV, teknologi lain seperti BB, gampang. Kalau di Vietnam, Kamboja, tidak demikian.

Keempat, Singapura merupakan lokasi yang mudah dijangkau dari Indonesia sehingga memudahkan pihak lain, seperti pengacara atau keluarga, menemui para pelarian. Singapura sebagai tempat enak untuk bertemu berbagai pihak dari Indonesia, pengara dan lain-lain.³

Menurut Humas KPK, Putri Rahayu. Pemulangan koruptor tidak efektif jika melalui Mutual Legal Assistance, Komisi Pemberantasan Korupsi memulangan Nazaruddin melalui jalur imigrasi. Pemulangan nazaruddin ke Indonesia dengan bantuan interpol Columbia karena Nazaruddin melakukan pemalsuan paspor sehingga

³Heru Margianto. Singapura dan Koruptor Indonesia. <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/22/06562758/Singapura.dan.Koruptor.Indonesia>. (10 Agustus 2015)

berhasil kabur ke Columbia. Dengan jalur non-formal tersebut maka tersangka Nazaruddin berhasil dibawa pulang ke Indonesia.⁴

Pemulangan koruptor sebaiknya di lakukan dengan jalan ekstradisi. Tujuan menghadirkan saksi dapat ditempuh dengan jalur *Mutual Legal Assistance*, namun berdasarkan realita dilapangan pemulangan koruptor tidak efektif jika dilakukan dengan jalur tersebut, KPK menempuh jalur non formal dalam pemulangan koruptor ditambah lagi proses *Mutual Legal Assistance* yang cukup panjang.

Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana tidak lepas dari peran penting lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

Ada beberapa Lembaga-lembaga Penegak Hukum yang berperan dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana diantaranya:

1. Kepolisian Republik Indonesia

Bantuan hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) oleh Kepolisian RI dilaksanakan berdasarkan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dengan beberapa dasar hukum peraturan perundang-undangan.

“...there is a well-defined legal framework for mutual legal assistance in criminal matters that guide any operational action, consisting of a patchwork of multilateral and bilateral treaties. The term “Police Cooperation” is misleading in some ways, because on many occasions the police in the consent of the competent judicial authorities before they can ask for a provide mutual legal assistance. Which

⁴ Wawancara dengan Humas KPK, pada tanggal 30 Juli 2015

*institution is competent depends on the type of assistance required and the country involved.*⁵

Dalam prakteknya, pelaksanaan *Mutual Legal Assitance* diselenggarakan melalui beberapa jalur, seperti (i) saluran diplomatik, (ii) antar Otoritas Pusat (*Central of Authority*), (iii) saluran interpol dan (iv) antar Institusi Penegak hukum (*Law Enforcement Agency*). Dasar pelaksanaan kerjasama lainnya adalah beberapa *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kepolisian dengan Pemerintah negara lain seperti⁶:

- a. Wilayah Asia: Kepolisian Korea Selatan, Kepolisian Vietnam, Kepolisian Philipina, Kepolisian RRC.
- b. Wilayah Australia- Pasifik: Kepolisian Australia dan Kepolisian Selandia Baru;
- c. Wilayah Amerika: Kepolisian Amerka Serikat;
- d. Wilayah Eropa: Kepolisian Inggris, Kepolisian Irlandia Utara, Kepolisian Romania Kepolisian Polandia dan Kepolisian Belanda;

Kedudukan Divhubinter Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang hubungan internasional yang berada di bawah kapolri. Divhubinter Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau (NCB)*- INTERPOL dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/

⁵Kluin Maniek. *Environmental Crime and its Victim Perspective within Green Criminalology*. Ed. Toine Spapen, Rob Whitw.(Burlington: Ashgate Publishing Limited. 2014) h. 263

⁶International Police (INTERPOL). <http://www.interpol.go.id/id/uu-danhukum/mou>. (12 Desember 2014).

transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia (*capacity building*) serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.⁷ Dalam melaksanakan tersebut diatas, Divhubinter Polri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan pembinaan kegiatan administrasi personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan keuangan, serta pengkajian strategis Divhubinter Polri dalam kerangka kerjasama internasional;
- 2) Penyiapan administrasi perjalanan dinas personel Polri ke luar negeri dan pelaksanaan koordinasi protokoler rangkaian kegiatan kunjungan dinas tamu VVIP dan anggota internasional;
- 3) Pelaksanaan kerjasama lintas sekorat dalam rangka penganggulangan kejahatan internasional/ transnasional, pertukaran informasi inteleken kriminal, pelayanan umum internasional (*International Public Service*), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA);
- 4) Pertukaran informasi tentang kejahatan internasional/transnasional dan informasi lainnya berkaitan dengan *international event* dan kerjasama internasional melalui sistem jaringan komunikasi INTERPOL, ASEANPOL,

⁷ <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi>. (12 Desember 2014)

UNDPKO (*United Nation Department of PeaceKeeping Operations*) dan sistem informasi lainnya;

- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan memfasilitasi personel Polri yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan;
- 6) Pelaksanaan koordsiansi dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian negara akreditasi dan organisasi resmi internasional (PBB, ICPO-INTERPOL) serta organisasi intenasional lainnya yang diakui dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan sarana Polri;
- 7) Pelaksanaan dan pembinaan Atase Polri, *Senior Liaison Officer (SLO)*, Staf Teknis Polri, dan *Liaison Officer (LO)* serta personel Polri yang yang bertugas di luar negeri, organisasi internasional dan kantor kepolisian di negara akreditasi;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan atase Kepolisian dengan Negara lain atau LO/ penegak hukum negara lain di Indonesia serta melakukan koordinaasi dan komunikasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanaan dan penegakan hukum di perbatasan;
- 9) Pelaksanaan hubungan kerjasama onternasional di luar negeri yang meliputi kerjasama di bidang kepolisian, penegak hukum dan perlindungan WNI di luar negeri;

Kondisi pada saat ini terkait kejahatan transnasional yang melewati batas-batas negara, pada akhirnya membutuhkan kerjasama dari negara-negara yang terkait

dalam proses hukumnya. Dalam hal ini, bantuan hukum timbal balik menjadi kerjasama yang paling penting dalam upaya penegakan hukum tidak terkecuali pelaksanaannya melalui lembaga kepolisian RI. Jalur Interpol yang dipergunakan melalui lembaga kepolisian akan saling berkoneksi melalui *focal point*/ kepolisian negara masing-masing. Sebagaimana ketentuan dalam UU NO. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum timbal Balik dalam Masalah Pidana. Di dalam pasal 3 mengenai lingkup bantuan timbal balik yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum, memberikan dasar kewenangan seperti membantu proses pencarian pelaku atau tersangka. Apabila kepolisian RI telah mengetahui identitas pelaku melalui jalur interpol, buronan internasional (tersangka WNI maupun WNA) dapat dimasukkan dalam kategori “*Red Notice*” atau permintaan penangkapan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai buron. Penyampaian identitas buron dikirimkan ke kantor pusat Interpol di Lyon, Perancis dan dalam jangka waktu beberapa hari *Red Notice* tersebut akan dikirimkan ke 188 negara anggota Interpol dan dapat diakses di situs *National Central Bureau International Police* (NCB Interpol) Indonesia. Penerbitan *Red Notice*, di beberapa negara yang tidak otomatis akan menangkap tersangka buron, terkecuali negara yang meminta telah memiliki perjanjian ekstradisi. Contohnya, Pemerintah Australia- Divisi Kerjasama Kejahatan Internasional Kementerian Kehakiman Australia sebagaimana tercantum dalam *Fact Sheet 5- Extradition and Provisional Arrest* ⁸ menyebutkan bahwa:

⁸Proses Pencarian Pelaku Kejahatan Transnasional melalui interpol <http://www.Hukumonline.com/klinik/detail.lt4ffae8265d21c/proses-pencarian-pelaku-kejahatan-transnasional->

“for the purpose of extradition, Australia does not arrest person on the basis of receiving a Red Notice. Generally, Australian Law enforcement officers can only arrest a person for an offence against Australian Law. Their Arrest powers does not enable them to act on an interpol Red Notice. The Extradition Act sets out procedures for obtaining an arrest warrant from an Australian magisterate to arrest a person at the request of a foreign country with which Australia has an extradition relationship”

Penemuan tersangka oleh Pemerintah Australia harus diproses melalui pengajuan permohonan sementara (*provisional arrest*) kepada Kementerian Kehakiman Australia. Pengajuan tersebut dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (sebagai otoritas pusat) dan pengajuan dokumen tersebut harus sesuai dengan kebutuhan administratif yang diprasyaratkan oleh Kementerian Kehakiman Australia dalam Proses bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Dalam diskusi kordinasi yang dilaksanakan di Bappenas, kinerja kepolisian dalam proses MLA, antara lain mempergunakan jaringan *agency to agency* yang membutuhkan peningkatan kapasitas sumberdaya, dengan instansi pengak hukum dan instansi terkait lainnya dalam proses penegakan hukum dan dukungan finansial. Terhadap dukungan finansial, menurut informasi di Polri tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk kerjasama dalam proses MLA baik dilaksanakan mekanisme *agency to agency* maupun kerjasama yang dilaksanakan melalui koordinasi oleh Otoritas Pusat.⁹

melalui interpol. (12 Desember 2014)

⁹Paparan Quo Vadis Kerjasama MLA” disampaikan dalam rapat “Koordinasi Prencanaan dan Penganggaran Otoritas Pusat dalam Rangka Bantuan Timbal Balik, Ruang Rapat SG-5, bappenas, 7

2. Kejaksaan RI

Terkait pelaksanaan kerjasama internasional dan Mutual Legal Assistance di lingkungan Kejaksaan RI, dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, dibawah kewenangan jaksa Agung Pembinaan (Jambin)- berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-009/A/JA/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Secara Teknis, pelaksanaan Kejaksaan Republik Indonesia. Secara teknis, pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Bagian Kerjasama Luar Negeri.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) bentuk kerjasama internasional di bidang hukum pidana, (i) Ekstradisi, (ii) *transfer of Sentenced Person* (iii) Bantuan Hukum Timbal Bail Dalam Masalah pidana, menyangkut tindakan-tindakan hukum dalam proses penyelidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan serta perampasan hasil kejahatan.

Sebagai landasan kerjasama internasional, kejaksaan telah menjalin hubungan antar institusi antara lain.

Mei 2013, disampaikan oleh bapak Dadang Sutrasno, Kasubbag Bankuminter NCB-INTERPOL Indonesia, Divhubinter Polri.

- a. Perjanjian antara Kejaksaan RI dan Kejaksaan Malaysia dalam bidang kerjasama hukum (*Agreement between the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and the Attorney General's Office of Malaysia on legal Cooperation Activities*) pada tanggal 2 April 2012.
- b. Nota Kesepahaman dalam bidang kerjasama antara Kejaksaan RI dan Kejaksaan Republik Korea (*MoU between the Attorney General's Office the Republic of Indonesia and the Attorney General's Office of the Republic of Korea on Cooperation Activities*) pada tanggal 1 Juli 2011;
- c. Nota kesepahaman dalam bidang kerjasama antara Kejaksaan RI dan Kejaksaan Republik Agung Federasi Rusia (*MoU between the Attorney general's Office of the Republic Indonesia and the Office the Prisecutor of the Russian Federation on Cooperation Activities*) di Moskow, pada tanggal 1 Desember 2006;
- d. Komunijasi bersama (*Joint Communique*) antara Pemerintah RI dengan *United Nations Transnational Administration in East Timor* (UNTAET) di Dhili pada tanggal 29 Februari 2000;
- e. Komunikasi bersama (*Joint Communique for Cooperation in Legal Field between Attorney General of Indonesia and Head of Supreme Precuratorate of the Socialist Republic of Vietnam*) di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1996;
- f. Surat perjanjian pelaksanaan Program Regional di Peradilan Pidana dengan UNODC (*Letter of Agreement between the Relevant authority of the Republic of Indonesia and the UNODC on the Implementation of the Regional*

Programme on Criminal Justice “towards Asian Just” ditandatangani oleh Kepala Biro hukum Kejaksaan Agung dengan perwakilan *Regional Centre for East Asia and Pasific* pada tanggal 12 Oktober 2010.

- g. Rencana Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua New Guinea (PNG) melalui kementerian hukum masing-masing telah sepakat untuk melakukan kerjasama di bidang ekstradisi.¹⁰ salah satu yang menjadi incaran Pemerintah Indonesia yakni terpidana kasus pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali Tjoko Sugiarto Thandra. Konglomerat tersebut telah mengganti status menjadi warga negara PNG setelah kabur dari Indonesia pada tahun 2009. Menteri Hukum dan HAM(Menkumham) Amir Syamasuddin mengatakan bahwa perjanjian ekstradisi akan memudahkan proses pemulangan tersangka atau terpidana dari PNG ke Indonesia. Setelah diratifikasi, maka perjanjian itu sah digunakan untuk melakukan proses ekstradisi. Menurut Basrief Arief (Jaksa Agung) Nota kesepahaman terkait perjanjian ekstradisi dengan dengan PNG, akan memudahkan upaya pemulangan terpidana seperti Tjoko Chandra, pihaknya akan menyiapkan tim khusus untuk memulangkan Djoko chandra. Selama ini upaya pemulangan Djoko Chandra terkendala karena Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan PNG”. Djoko Chandra telah dijatuhi vonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009. Bos Grup Mulia itu dijatuhi hukuman dua tahun penjara serta denda RP 15 juta. Ia juga

¹⁰Kejaksaan Republik Indonesia. <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=o&idsu=0&id=7741>. Djoko Tjandra akan diekstradisi dari PNG (12 Desember 2014)

diwajibkan menyerahkan uang pengganti senilai Rp 546 miliar untuk menutupi kerugian negara.

Sebagai tambahan, Kejaksaan Agung telah menandatangani deklarasi bersama (Joint declaration) antara lain dengan:

- 1) *Declaration of Asia-Europe Meeting (ASEM) Prosecutor-General Conference*, Shenzhen, China, tanggal 12 Desember 2005;
- 2) *Joint Statement on the 3rd Asean-China Prosecutor-General Conference*, Jakarta, 1 Agustus 2006;
- 3) *Joint Declaration of the 5th China-ASEAN Prosecutors-Generals Conference*, 11-13 November 2008;
- 4) *Joint Declaration of the 6th China-ASEAN Prosecutors-General conference*, Hanoi, 25 November 2009.

Kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan MLA antara lain (i) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dimana Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang; (ii) Kewenangan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang MLA, kejaksaan dalam proses MLA baik dalam hal permintaan bantuan Indonesia ke negara asing, maupun proses permintaan negara lain ke Pemerintah Indonesia, yaitu:

Tahapan Proses Permintaan Bantuan Indonesia ke Negara Lain	Tahapan Proses Permintaan Permintaan Negara lain kepada Pemerintah Indonesia
1. Jaksa Agung Dapat mengajukan permohonan bantuan melalui Menteri Pasal 9 ayat (2)	Jaksa agung menindaklanjuti permintaan bantuan dari Negara peminta yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Menteri, lalu menyreahkan hasil dari pelaksanaan Bantuan kepada Menteri . (Pasal 32 Ayat (3) dan (4);
2. Memberikan informasi kepada Menteri dalam permohonan Bantuan mencari atau mengidentifikasi orang yang ada hubungan dengan suatu perkara yang sedang dalam Penyidikan, Penuntutan, atau Sidang yang dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain terkait penyidikan, penuntutan atau Sidang) (Pasal 11);	Bila pernyataan bantuan disetujui dan Negara Peminta meminta salinan dokumen dilegalisasi, maka menteri meminta pejabat berwenang melegalisasi dan menyerahkannya kembali kepada Menteri (Pasal 32 ayat (5);
3. Memberikan informasi terkait alat	Memeberikan pertimbangan hukum dalam

<p>bukti yang diperlukan dalam rangka suatu Penyidikan, Penuntutan atau Sidang; Mengambil pernyataan di Negara Asing atau alat bukti lain yang berada di negara Asing (pasal 12)</p>	<p>hal permintaan bantuan dari negara peminta adalah untuk tujuan penggeledahan dan sita barang, benda atau harta kekayaan dan menindaklanjuti dengan mengajukan Permohonan surat izin penggeledahan dan Penyitaan kepada Ketua PN setempat (Pasal 41)</p>
<p>4. Melakukan pemeriksaan silang melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana telekomunikasi atau sarana elektronik lainnya, baik dalam tahap Penyidikan, penuntutan atau sidang dengan:</p> <p>a. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim; atau</p> <p>b. Tersangka, terdakwa atau kuasa hukumnya (pasal 13)</p>	<p>Melaksanakan sita atau geledah berdasarkan surat izin pengadilan (Pasal 44)</p>
<p>5. Menghadirkan orang di Indonesia untuk memberikan keterangan,</p>	<p>Menyerahkan barang bukti atau benda sitaan kepada Rupbasan (Pasal 45);</p>

<p>dokumen alat bukti lainnya, atau memberikan Bantuan lain dalam Penyidikan, Penuntutan atau sidang pengadilan, serta menempatkan orang tersebut dalam tahanan sementara selama berada di Indonesia (pasl 15)</p>	
<p>6. Memberikan informasi terkait bukti permulaan yang cukup untuk pengajuan permintaan bantuan kepada negara asing untuk mengeluarkan surat perintah blokir, geledah sita atau lainnya yang diperlukan sesuai dengan UU yang terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di Indonesia (Pasal 19- Pasal 20)</p>	<p>Menyampaikan perkembangan hasil penyitaan kepada Menteri untuk diteruskan kepada Negara Peminta (pasal 46)</p>

<p>7. Memberikan informasi tentang surat yang diperlukan dalam hal permohonan bantuan penyampaian surat (pasal 21)</p> <p>8. Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan bantuan menindak lanjuti putusan pengadilan melalui menteri Putusan Sita eksekutorial pidana denda atau bayar UP (Pasal 22)</p>	
--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Kejaksanaan dalam hal ini memiliki peran dalam setiap tahapan pemberian bantuan, dimana kejaksanaan berperan sebagai penyidik, penuntut umum dan eksekutor dan hanya satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan melaksanakan keputusan pengadilan. Proses yang dilaksanakan kejaksanaan merupakan proses penanganan perkara, peran pro-jus titia dan hanya bisa dilaksanakan oleh institusi yang merupakan bagian dari sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Kejaksanaan berdasarkan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama negara negara yang berpotensi sebagai “*safe heaven*” bagi tersangka/terpidana kasus korupsi

berharap agar proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh institusinya dapat berjalan lebih baik dimasa yang akan datang. Kerjasama melalui *agency to agency* juga menjadi fokus utama dari kejaksaan, sebagai salah satu saluran kerjasama yang efektif dalam proses menangani tindak pidana korupsi, meskipun koordinasi satu pintu akan tetap bermuara ke otoritas pusat.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengaturan mengenai pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* untuk institusi kpk mempunyai dasar yang sama dengan institusi penegak hukum lainnya, yaitu UU NO. 1 2006. Disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 9 ayat (3). Untuk selanjutnya secara spesifik, koordinasi yang dilaksanakan oleh KPK antara lain untuk kebutuhan *Mutual Legal Assistance* adalah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 12 angka 1 huruf H yaitu “ meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri”.

Dalam melaksanakan –permintaan maupun penanganan bantuan, KPK bekerjasama dengan Otoritas Pusat dan juga melakukan komunikasi informal dengan negara- negara dimana target penanganan kasus ditetapkan.

Secara internal KPK mempunyai SOP untuk memproses penanganan permintaan, baik alur permintaan bantuan internasional dilaksanakan secara formal maupun non formal. Pengertian jalur formal adalah dalam hal KPK melaksanakan tindakan pro-justicia (tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum) maka jalur mekanisme Mutual Legal Assistance terkait pelaksanaan beberapa tindakan seperti tindakan yang diperlukan terhadap suatu kasus setelah masuk tahap penyidikan akan dipergunakan. Tindakan pro-justicia ini dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti di dalam sidang di pengadilan. Untuk jalur non formal, sebagaimana yang dilaksanakan oleh kepolisian, dan kejaksaan, tindakan maupun kerjasama yang dilakukan adalah antar institusi (*agency to agency cooperation*), bersifat intelejen untuk mencari bukti dan masukan lainnya dalam penanganan perkara yang ditangani KPK dan hasilnya tidak dapat dipergunakan di sidang pengadilan.

Tekad dunia Internasional untuk memberantas korupsi diwujudkan dengan lahirnya *United Nations Convention against Corruption* 2003 (UNCAC 2003) yang diterima oleh sidang Majelis Umum PBB (SMU PBB) pada tanggal 31 Oktober 2003 melalui Resolusi SMU PBB A/58/4. SMU PBB juga menyatakan bahwa konvensi terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara PBB dalam suatu acara khusus di Merida, Meksiko pada tanggal 9-13 Desember 2003. Hingga kini telah terdapat 140 negara penandatanganan dan telah ada 107 yang menundukkan diri sebagai negara pihak. Konvensi telah mulai berlaku sejak 14 Desember 2005 dan merupakan *The*

first Legally Binding Global Anti Corruption Agreement (Persetujuan Pertama yang Mengikat secara Hukum mengenai Anti korupsi).

Langkah produktif yang harus ditempuh untuk dilaksanakan guna mengatasi kejahatan transnasional adalah dengan meratifikasi berbagai ketentuan hukum pidana internasional. Indonesia merupakan negara pihak ke-57 yang menandatangani UNCAC 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, pada tanggal 18 April 2006. Sesuai dengan Undang-undang No. 24 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional, tindakan Pengesahan tersebut dilaksanakan melalui proses pembuatan undang-undang oleh DPR-RI dengan telah memberlakukan konvensi tersebut sebagai hukum nasional Indonesia yang menimbulkan kewajiban hukum bagi setiap lembaga atau individu di Indonesia.

B. Kendala-kendala Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
(Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

Beberapa faktor yang menghambat upaya pemburuan dan pemulangan pelaku tindak pidana yang berhasil lari dan bersembunyi di negara lain adalah:

1. Pengaruh Geostrategis Dan Geopolitik Indonesia Sebagai Bargaining Power Negara Dalam Memandang Dan Menyikapi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Lari Dan Bersembunyi Di Luar Negeri.

Memahami faktor-faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pemulangan pelaku tindak pidana yang berhasil kabur dan bersembunyi di luarnegeri adalah

adanya konsep Geostrategis dan geopolitik suatu negara dalam konstelasi hubungan antar negara dalam tataran regional maupun internasional.

Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji masalah strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai empat unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.

Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara disekitarnya/ negara tetangga merupakan pengaruh yang paling besar.

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting diantara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar diantara negara-negara raksasa di dekatnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara tersebut, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dan lain-lain.

Menurut ringkasan eksekutif terhadap Buku Putih Pertahanan yang diterbitkan oleh Dephan perubahan Politik dunia yang terjadi di era globalisasi telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain menyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru. Di masa lalu, isu keamanan tradisional cukup menonjol, yakni yang berhubungan dengan geopolitik dan geostrategis, khususnya pengaruhnya kekuatan blok barat dan timur. Pada masa itu, kekhawatiran dunia terhadap dunia terutama pada masalah pengembangan kekuatan militer dan senjata strategis serta hegemoni. Isu keamanan pada dekade terakhir ini makin kompleks dengan meningkatnya aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyeludupan, imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial.

Dinamika konteks strategis yang diwarnai berbagai isu politik, ekonomi mempengaruhi aspek keamanan global, regional maupun domestik. Isu politik, ekonomi dan keamanan merupakan aspek-aspek yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Pada lingkup global, berakhirnya perang dingin ternyata tidak menjamin terwujudnya stabilitas keamanan dunia. Dunia masih tetap diwarnai oleh isu-isu

keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau proliferasi senjata nuklir dan senjata pembunuh masal. Kompleksitas permasalahan keamanan global makin bertambah dengan adanya praktek hegemoni yang dikembangkan melalui penguatan aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi, termasuk keunggulan di bidang ekonomi.

Pada lingkup regional, perkembangan dan kecenderungan global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan kawasan regional. Kecenderungan yang muncul di kawasan adalah terjadinya pergeseran pada masalah keamanan regional, anatara lain adanay konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut. Isu-isu keamanan non—tradisional yang terjadi [pada lingkup global; juga menjadi isu utama kawasan regional. Interaksi dan dinamika hubungan negara-negara besar dunia seperti amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia, dan Uni Eropa akan merupakan faktor yang berpengaruh dalam peta keamanan di Asia Pasifik.

Pada lingkup domestik, Indonesia sebagai bangsa yang berada di tengah-tengah perkembangan dunia, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Dinamika politik ekonomi, sosial dan keamanan yang terjadi di kawasan ikut berpengaruh terhadap perkembangan sosial politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia. Isu keamanan domestik yang timbul pada dekade terakhir ini, tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung. Selain faktor eksternal, terdapat pula sejumlah faktor internal yang berpotensi

mengganggu stabilitas keamanan nasional. Faktor-faktor tersebut antara lain, dampak heterogenitas suku bangsa Indonesia, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan sosial. Akumulasi faktor eksternal dan internal tersebut kemudian dalam berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, yang juga pada akhirnya berpengaruh terhadap daya tawar/*bagaimana* power suatu bangsa terhadap bangsa lain di sekitarnya.

2. Perbedaan Konsep Teritorialitas Dan Nasionalitas Dan Nasionalitas Setiap Negara

Pemahaman terhadap konsep geostrategis dan geopolitik suatu negara memiliki kaitan dengan cita-cita suatu bangsa berdiri dalam menyepakati suatu identitas yang terkait kedaulatan atas suatu wilayah dalam bentuk asas teritorialitas, sejumlah penduduk dengan pengakuan atas hak kewarganegaraan sebagai hak nasionalitas dan adanya suatu bentuk pemerintahan dengan hukum positif sebagai landasan.

Asas teritorialitas yang mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas ini merupakan asas yang paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Ketentuan asas teritorialitas di Indonesia termaktub dalam KUHP Pasal 2, yang berbunyi: “aturan pidana dalam perundang-undangan, berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hukum pidana Indonesia berlaku pada siapa saja, baik itu warga negara asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Mengenai maksud dari wilayah Indonesia adalah mencakup:

- a) Seluruh kepulauan maupun daratan bekas wilayah Hindia Belanda;
- b) Seluruh perairan teritorial Indonesia (laut dan sungai/danau) serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif (hasil konvensi Laut Internasional), yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula.
- c) Seluruh bangunan fisik kendaraan air atau pesawat berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri (lihat ketentuan UU No.4 /Tahun 1976)

Pemahaman atas batas berlaku suatu kedaulatan yang dimiliki negara, dalam hal ini Republik Indonesia dalam kepentingan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang kabur dan bersembunyi di luar negeri adalah kekuasaan negara Indonesia dibatasi hanya di wilayah Indonesia saja atau terhadap kendaraan air dan udara yang berada diluar wilayah negara namun menggunakan bendera Indonesia.

Pembatasan terhadap kekuasaan Negara Indonesia dalam penegakkan hukum juga meliputi pembatasan terhadap semua atribut penegakkan hukum yang dimiliki Indonesia, aparata penegak hukum Indonesia tidak dapat serta merta atas nama hukum dan keadilan melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap

setiap buron dari Indonesia yang lari ke luar negeri tanpa adanya persetujuan dan izin dari otoritas negara setempat.

Sebagai ilustrasi bahwa Singapura tidak mengizinkan POLRI ataupun jaksa dari Indonesia untuk datang dan menangkap orang walaupun orang tersebut adalah orang berkewarganegaraan Indonesia, merupakan buron atas kejahatan yang dilakukan di Indonesia, tanpa persetujuan dan izin otoritas singapura. Karena Singapura memiliki kuasa penuh atas semua orang yang berada dalam batas wilayah Singapura dan memiliki kuasa mutlak untuk memaksakan penerapan hukum positif Singapura terhadap semua orang dalam batas teritorialnya sehingga ketika penegak hukum Indonesia ingin menangkap dan memulangkan kembali pelaku tindak pidana dari luar negeri pemerintah Indonesia harus memiliki perjanjian dan kesepahaman dengan pemerintah Singapura berupa Ekstradisi maupun bentuk-bentuk kerjasama lain yang bisa dijadikan dasar menggunakan kekuatan hukum Indonesia dalam koridor tertentu di wilayah Singapura.

Sehingga dengan ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan negara-negara tempat pelaku tindak pidana yang bersembunyi. Selain pengakuan terhadap asas teritorialitas yang membatasi kekuasaan suatu negara hanya dalam wilayah geografis saja terdapat beberapa batasan lainnya seperti adanya asas Nasionalitas yang terbagi menjadi asas Nasionalitas aktif sebagai asas yang menyatakan suatu perundang-undangan hukum pidana yang berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negaranya, dimana saja ia berada termasuk juga saat warga

negara tersebut berada di luar wilayah negaranya. Penerapan secara mutlak terhadap ajaran kedaulatan negara rentan terhadap timbulnya berbagai masalah seperti benturan kedaulatan antar negara yang dapat memicu ketegangan hubungan bilateral bahkan mungkin peperangan.

Karena mengenai kasus tersebut, suatu negara beralih sebagai negara berdaulat berhak dan memiliki kewenangan untuk menindak tegas siapapun yang berbuat tindak pidana di wilayah negaranya, dan juga negara asal pelaku kejahatan dapat beralih adanya konsep kedaulatan negara yang mengajarkan bahwa setiap negara berdaulat dapat mengharapkan kepada setiap warga negaranya untuk tunduk patuh pada undang-undang negaranya dimana pun ia berada.

Untuk mengatasi problem tersebut, maka asas nasionalitas aktif hanya berlaku terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang mengancam kepentingan bangsa masing-masing. Jadi tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh warga negara di wilayah negara lain dapat diberlakukan hukum negaranya sendiri.

Asas nasionalitas pasif sebagai penafsiran lain dari asas nasionalitas secara umum adalah asas yang menyatakan berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara bagi setiap orang, warga negara atau orang asing yang melanggar kepentingan hukum Indonesia, atau melakukan perbuatan pidana yang membahayakan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri. Asas nasional

Pasif diatur dalam Pasal 4: “ ketentuan pidana dalam perundang-undang Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan pidan di luar Indonesia:

1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111, pada ke-1, 127 dan 131
2. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia

Pasal 8 ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi Nakhoda dan penumpang perahu Indonesia yang Indonesia, dasar hukum dari asas nasional pasif adalah tiap-tiap negara yang berdaulat pada umumnya berhak untuk melindungi kepentingan hukumnya.

Dengan demikian, undang-undang hukum pidana Indonesia dapat diperlukan terhadap siapa pun, baik warga negara maupun bukan warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara Indonesia dimanapun dan terutama di luar negeri. Misalnya melakukan kejahatan penting terhadap keamanan negara serta kepala negara Indonesia (pasal 104-108 KUHP)

3. Perbedaan dan Perkembangan Sistem Hukum Tiap Negara Yang Berbeda

Perbedaan sistem hukum juga menjadi kesulitan bagi Otoritas Pusat untuk melakukan permintaan bantuan timbal Balik. Hikmahonto mengatakan:

“the differences in legal system and legal tradition (such as the continental based civil law and the anglo saxon common law) and diffences forfeiture system (value based system as apposed to property based system) are indeed

major obstacle to effective asset recovery regime, there is also another issue of legal definition or certain crime that may vary from one jurisdiction to another. What constitutes “embezzlement” or “corruption” in one country maybe considered simply as “administrative error” in another country. At the enforcement level, differences also arise with regard to procedural law, burden of proof, and the timeframe to obtain assistance for recovering in a court proceeding.

For example, there is difference between the continental legal system (civil law) and the Anglo system common Law) with regard to the authority to freeze, seize, and confiscate assets. The main issue is whether the public attorney and/ or the court bailiff is entitled to directly seize or confiscate the asset, as apposed to requiring prior registration the court decision. If one jurisdiction already considers a certain legal documentation is sufficient, while in another jurisdiction requires further order to operationalize the confiscation this may cause confusion in the court proceeding and thus delay the enforcement of a court decision. At worst, the country where the assets located can deny a request for asset recovery”.¹¹

Asas universalitas sebagai asas yang menyatakan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini diatur dalam pasal 4 sub ke-2 KUHP: “Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.” Juga dalam pasal 4 sub ke-4 yang berbunyi “melakukan salah satu kejahatan yang ditentukan dalam pasal 438 pasal 444, sampai pasal 446 tentang perampokan di laut dan yang ditentukan dalam pasal 447 tentang penyerahan alat pelayaran kepada perampok laut.

¹¹Opinio Juris. *Law Practice Of Asset Recovery In Indonesia: Challenges And Opportunities*. Hikmahanto Juwana dkk Volume 11. Mei-Agustus 2012.

Dalam penerapan asas universalitas ini dikaitkan dengan upaya pemburuan dan pemulangan terhadap pelaku tindak pidana yang kabur dan bersembunyi di luar negeri hanya dapat dilakukan bila negara yang digunakan sebagai bersembunyi menyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan maupun didakwakan kepada pelaku tindak pidana yang bersembunyi di suatu negara dinyatakan sebagai kejahatan yang sama terhadap hukum positif negara tempat pelaku tindak bersembunyi.

Di Indonesia, menyimpan uang palsu adalah merupakan tindak pidana yang dapat dihukum tetapi di negara lain seperti di Hongkong, menggunakan uang palsu belum tentu tindak pidana karena harus dibuktikan bahwa si pengguna tahu uang tersebut adalah palsu.

Ketiadaan perjanjian bilateral dan multi lateral terkait upaya ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana, terkait teknis pelaksanaan pengajuan ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* di Indonesia.

Banyak negara yang menganut “ekstradisi hanya dapat dilakukan apabila ada perjanjian ekstradisi” Indonesia baru mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Thailand, Philipina, Australia, Hongkong, Korea Selatan dan Singapura. Sedangkan pelaku kejahatan yang dicari berada di Belanda, Kanada, Amerika Serikat, Republik Rakyat Cina dan negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana belum Efektif dalam upaya memulangkan koruptor di luar negeri karena pemulangan Nazaruddin dan koruptor lainnya oleh otoritas pusat lebih memilih jalur non formal
2. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh otoritas pusat, antara lain:

Pengaruh geostrategis dan Geopolitik Indonesia sebagai *Bargaining Power* Negara dalam memandang dan menyikapi terhadap pelaku tindak pidana yang lari dan bersembunyi di luar negeri, Perbedaan konsep teritorialitas dan nasionalitas dan nasionalitas setiap negara, perbedaan dan perkembangan sistem hukum tiap negara yang berbeda.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebaiknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengadakan beberapa tindakan diantaranya:

Pertama, perlu adanya mekanisme penataan kelembagaan dengan koordinasi yang lebih optimal. Dalam prakteknya ditemukan belum optimalnya pelaksanaan koordinasi para pemangku kepentingan dalam upaya penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi. Perlu adanya konsep rekonseptualisasi peran otoritas pusat ke depan sebagai pusat koordinasi diantara lembaga penegak hukum. Salah satu upaya adalah mekanisme

pertemuan antar pihak secara berkala dengan para pihak yang terlibat dalam proses bantuan timbal balik.

Kedua, kementerian hukum dan ham secara kelembagaan dapat diproyeksikan menjadi “*knowledge centre*” dengan para pemangku kepentingan lain baik di dalam maupun di luar negeri terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Ketiga, menempatkan tenaga kerja fungsional di otoritas pusat untuk menangani tugas dan fungsi otoritas pusat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Cet. III; Rajawali Press, 2002.
- Agustina, Rosa dalam Juniver Ginsang, “ Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006, *Disertasi*. Bandung: PPs Universitas Padjajaran, 2010.
- Akehurt, Michael. *Modern Introduction to International Law*, Edisi ke-IV. London: George Allen University, 1982.
- Arifuddin, Cecep. http://www.fhumj.org/berita_info/berita_detail/12 (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta) (10 Agustus 2015)
- Atsasmitta, Romli *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung : Mandar Maju, 1995.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Central Authority dan Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. Jakarta: BPHN, 2012.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik* (Jakarta: BAPPENAS, 2013.
- Cyrer, Robert dan Hakan Friman, *An Introduction to Incriminal Law and Procedure*. London: Cambridge University Press. 2014
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemahan Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Gultom, Elisatris “*Mutual Legal Assistance dalam kejahatan Transnasional Terorganisasi*”elisatris.wordpress.com (11 Desember 2014).
- Heru Margianto. Singapura dan Koruptor Indonesia. <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/22/06562758/Singapura.dan.Koruptor.Indonesia>. (10 Agustus 2015)
- Icha Rastika. KPK sidik kasus Korupsi yang Diduga Libatkan Nazaruddin. <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/28/1737242/KPK.Sidik.Kasus.Korupsi.Lainy.ang.Diduga.Libatkan.Nazaruddin>. (KOMPAS). (10 Agustus 2015)
- International Assistance*, <http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fps-sfp/fpd/ch43.html> (11 Desember 2014)
- International Police (INTERPOL). <http://www.interpol.go.id/id/uu-danhukum/mou> (12 Desember 2014)
- Interpol. <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tugas-dan-fungsi>. (12 Desember 2014)
- Iqbal, Muhammad *Fikih Siyasah*. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.

- Jessup, Philip C. *A Modern Law of Nations (Pengantar Hukum Modern Antarbangsa)*, terj. Fitria Mayasari. Cet. I ; Bandung: Nuansa, 2012.
- Kanter, EY dan R. Siantuari, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni AHM-P{THM, 1982.
- Kejaksaan Republik Indonesia. <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=o&idsu=0&id=7741>. Djoko Tjandra akan diekstradisi dari PNG (12 Desember 2014)
- Kelsen, Hans *Principles of International Law*, ed. Robert W. Tucker. New York: Hotf Reinhart and Winston Inc, 1967.
- Kelsen, Hans *Teori Murni Tentang Hukum, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Judul Asli *General Theory of Law*, Alih Bahasa Soemardi. Jakarta: Rimdi Press 1995.
- Kerjasama Internasional dalam Masalah Pidana, strdoall.blogspot.com (11 Desember 2014).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Maniek, Kluin. *Environmental Crime and its Victim Perspective within Green Criminalology*. Ed. Toine Spapen, Rob Whitw. Burlington: Ashgate Publishing Limited. 2014
- Opinio Juris. Law Practice Of Asset Recovery In Indonesia: Challenges And Opportunities. Hikmahanto Juwana dkk Volume 11. Mei-Agustus 2012.
- Parthiana, I Wayan. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 29.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya, 2004.
- Pengertian ahli www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html?m=1#
- Perbandingan Ekstradisi dan MLA, <http://mekar-sinurat.blogspot.com> (11 Desember 2014).
- Pratikno, Yudi “*Analisis dan Evaluasi Undang-undang No.1 Tahun 2006 tentang Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*”, *Disertasi*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2007.
- Proses Pencarian Pelaku Kejahatan Transnasional melalui interpol <http://www.Hukumonline.com/klinik/detail.lt4ffae8265d21c/proses-pencarian-pelaku-kejahatan-transnasional-melalui-interpol>. (12 Desember 2014)
- Rommelink, Jan Hukum Pidana. *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Situmorang, Mosgan. Perbandingan Hak dan Kewajiban Negara dalam Pemberian Bantuan Timbal Balik” , *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta: BPHN, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Tempo.<http://nasional.tempo.co/read/news/2011/05/26/063337023/nazaruddin-kabur-ke-singapura>

Upaya Penegak Hukum Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melarikan Diri dan Bersembunyi Di Luar Negeri. <https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/09/21/the-hunt-for-all-udin/>

Undang-undang:

Undang-undang No. 1 Tahun 2006



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sulaeman, Lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1992 di Lahaddato, anak kedua dari tiga bersaudara merupakan buah kasih sayang dari pasangan Suparman dan Hj. Suriyani. Penulis menempuh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 2 Baranti Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Di sekolah tersebut penulis menimba ilmu selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di MTs. Negeri Baranti, selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2008. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMA 1 PANCA RIJANG dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan diterima di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Semasa kuliah, penulis aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan tergabung dalam lembaga yaitu Forum Lingkar Pena UIN Alauddin, LPPM (Lembaga Penelitian dan Penalaran Mahasiswa) UIN Alauddin Makassar dan turt aktif dalam organisasi eksternal seperti MAKES (Al- Markaz for Khudi Enlightening Studies) dan HEC (Hasanuddin English Community).

Penulis merampungkan studi S1 dan selesai pada bulan September tahun 2015. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah swt bisa menimba ilmu yang merupakan bekal di masa depan. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan ilmu yang sudah di peroleh dengan baik dan dapat membahagiakan kedua orang tua

yang selalu mendoakan dan mendukung serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

